



PENGUATAN TATA KELOLA HILIRISASI NIKEL INDONESIA

Audry Amaradyaputri Suryawan*

Abstrak

Indonesia mendorong hilirisasi nikel melalui pembangunan smelter untuk meningkatkan nilai tambah nasional. Namun, ekspansi industri yang agresif menyebabkan oversupply, penurunan harga, dan penumpukan stockpile. Kondisi ini menekankan perlunya penguatan tata kelola hilirisasi agar industri nikel lebih adaptif dan berkelanjutan. Tulisan ini menganalisis kebijakan pembatasan izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel dan mengidentifikasi arah penguatan tata kelola hilirisasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembatasan izin smelter merupakan langkah strategis untuk menahan ekspansi berlebihan, menjaga keseimbangan supply-demand, mendorong pengembangan produk hilir bernilai tambah tinggi, serta meningkatkan ketahanan industri terhadap fluktuasi harga global. Langkah ini juga menegaskan perlunya penguatan tata kelola melalui penyusunan roadmap hilirisasi, pembangunan ekosistem industri, serta ketegasan dan konsistensi kebijakan. Sebagai tindak lanjut, Komisi XII DPR RI dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, mendorong penyusunan peraturan pendukung, dan memastikan pemanfaatan anggaran mendukung pembangunan ekosistem industri serta pengembangan produk hilir bernilai tambah tinggi.

Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mendorong hilirisasi mineral melalui pembangunan smelter nikel di berbagai daerah untuk meningkatkan nilai tambah nasional, namun perkembangan terbaru menunjukkan munculnya beberapa konsekuensi. Pertumbuhan smelter yang agresif memunculkan potensi *oversupply* di tengah permintaan global yang stagnan, tercermin dari turunnya porsi permintaan nikel untuk sektor kendaraan listrik dari 37% menjadi 18% pada tahun 2025 (Hidayatullah, 2025c; Rusdi, 2025).

Kondisi ini diperburuk oleh tingginya produksi produk antara yang mendorong ekspor produk nikel Indonesia mencapai sekitar dua juta ton per tahun, jauh di atas negara-negara produsen lain (Soehandoko, 2025). Kelebihan pasokan domestik dan lonjakan ekspor memperbesar ketidakseimbangan *supply-demand*, sehingga menekan harga nikel global hingga 40% dalam lima hingga tujuh tahun terakhir (Hidayatullah, 2025a). Tekanan pasar yang melemah menyebabkan sejumlah fasilitas pengolahan menghentikan operasi, termasuk beberapa smelter besar di Sulawesi (Setiawan, 2025). Penurunan aktivitas tersebut

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: audry.suryawan@dpr.go.id

mengurangi serapan bijih nikel dan memicu penumpukan *stockpile*. Pada tahun 2025, kuota produksi bijih nikel mencapai 364 juta ton, sementara serapan smelter hanya sekitar 120 juta ton (Nurdifa, 2025).

Melihat ketidakseimbangan ini, pemerintah menegaskan perlunya pengaturan produksi, salah satunya dengan pembatasan izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk antara tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembatasan izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel, serta mengidentifikasi arah penguatan tata kelola hilirisasi nikel agar pengembangan industri ke depan lebih terukur dan berkelanjutan.

Kebijakan Pembatasan Izin Investasi Baru Smelter Nikel

Pemerintah menetapkan pembatasan izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel yang hanya memproduksi produk antara tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perusahaan pemegang izin usaha industri tidak diperkenankan membangun fasilitas pengolahan baru yang berfokus pada produk antara seperti *nickel matte*, *mixed hydroxide precipitate* (MHP), feronikel, dan *nickel pig iron*. Pembatasan serupa juga berlaku bagi smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis *high pressure acid leach* yang hanya menghasilkan MHP. Kebijakan ini merupakan respons terhadap pola hilirisasi yang selama ini masih bergantung pada ekspor produk antara (Hidayatullah, 2025a).

Pembatasan izin smelter diharapkan mendorong pengembangan produk hilir bernilai tambah lebih tinggi, seperti baja tahan karat, nikel sulfat, dan barang jadi berbasis nikel. Kebijakan ini juga menjadi langkah korektif terhadap ekspansi smelter yang berlebihan, yang diharapkan dapat menekan kelebihan pasokan nikel domestik serta mendukung stabilitas harga di tingkat global. Selain itu, kebijakan ini membuka peluang bagi investor untuk melanjutkan penghiliran nikel ke tahap lebih lanjut dalam rangka memperkuat nilai tambah industri nasional (Hidayatullah, 2025d).

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan implementasi kebijakan ini. Sekitar 45 smelter dalam perencanaan dapat mengalami penundaan atau pembatalan, sementara sekitar 38 smelter dalam tahap konstruksi mungkin memerlukan penyesuaian teknologi agar mampu menghasilkan produk hilir bernilai tambah tinggi (Hidayatullah, 2025b). Kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi penyerapan tenaga kerja dan perekonomian di daerah terkait. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan keseimbangan antara tujuan hilirisasi, pengembangan industri, dan manfaat sosial-ekonomi.

Untuk mendukung implementasi kebijakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan penyesuaian target produksi nikel untuk tahun 2026. Target produksi akan disesuaikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar lebih

sejalan dengan kebutuhan pasar, diperkirakan berada di bawah realisasi tahun ini yang mencapai sekitar 319 juta ton (Mardiansyah, 2025). Penyesuaian suplai bijih nikel juga menjadi bagian dari upaya tersebut, mengingat jumlah smelter yang terintegrasi dengan tambang masih terbatas dan sebagian belum beroperasi optimal (Mardiansyah, 2025). Selain itu, Kementerian ESDM memperbarui ketentuan produksi dan memperpendek frekuensi penerbitan RKAB dari tiga tahun menjadi satu tahun sekali.

Pengaturan produksi nikel harus diselaraskan dengan instrumen kebijakan lain agar tujuan hilirisasi tercapai. Penyesuaian target produksi melalui RKAB tahunan memastikan pengendalian *supply-demand* lebih responsif terhadap dinamika pasar, sementara prioritas pasokan bijih untuk smelter yang terintegrasi dengan pengolahan hilir (*domestic market obligation*) dapat mendorong pengembangan produk bernilai tambah tinggi. Selain itu, pemberian insentif bagi investasi di rantai nilai lanjutan dapat memperkuat diversifikasi industri. Dengan demikian, pembatasan izin smelter disertai dengan keselarasan antar instrumen kebijakan diharapkan tidak hanya menahan ekspansi smelter yang berlebihan dan menjaga keseimbangan *supply-demand*, tetapi juga mendorong pengembangan produk hilir bernilai tambah tinggi serta meningkatkan ketahanan industri terhadap fluktuasi harga nikel global.

Penguatan Tata Kelola Hilirisasi Nikel

Kondisi saat ini menjadi sinyal kuat perlunya penguatan tata kelola dan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia agar lebih adaptif terhadap dinamika global. Hilirisasi nikel tidak boleh berhenti pada produk antara, tetapi harus segera diarahkan ke tahap hilirisasi lanjut dengan produk bernilai tambah lebih tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu meninjau ulang tata kelola hilirisasi nikel nasional agar lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk dengan penyusunan *roadmap* yang seimbang antara optimisme pengembangan industri dengan mitigasi risiko dari fluktuasi harga, kelebihan produksi, dan perubahan teknologi global (Hidayatullah, 2025a). Penguatan tata kelola juga mencakup pembangunan ekosistem industri nikel yang mendukung pengolahan dan pemurnian produk turunan dari smelter. Langkah ini akan membuat industri nikel nasional lebih tahan terhadap gejolak harga sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara dan masyarakat (Nurdifa & Hidayatullah, 2025).

Selain itu, penguatan regulasi di sektor hulu menjadi bagian integral dari tata kelola hilirisasi. Pembatasan izin smelter harus diikuti dengan pengaturan ketat terhadap izin usaha pertambangan khusus, mengingat jumlah RKAB yang disetujui hingga kini mencapai 292 izin dengan total luas konsesi 866.292 hektare (Hidayatullah, 2025b). Tanpa kontrol di sektor hulu, moratorium smelter hanya akan memindahkan tekanan produksi ke kawasan tambang, yang berpotensi memperparah kerusakan ekologis dan konflik sosial (Rhamadanty, 2025).

Oleh karena itu, penguatan tata kelola hilirisasi nikel harus mencakup penyusunan *roadmap* yang jelas dan terukur, pembangunan ekosistem industri yang mendukung pengolahan serta pemurnian produk turunan smelter, penguatan regulasi di sektor hulu, serta ketegasan dan konsistensi kebijakan. Langkah-langkah ini diperlukan agar pembatasan izin smelter dapat mengarahkan pembangunan industri nikel menuju hilirisasi yang lebih terukur, berkelanjutan, dan mampu menghasilkan nilai tambah tinggi bagi negara dan masyarakat.

Penutup

Kebijakan pembatasan izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel merupakan langkah strategis untuk menahan ekspansi smelter yang berlebihan, menjaga keseimbangan *supply-demand*, mendorong pengembangan produk hilir bernilai tambah tinggi, serta meningkatkan ketahanan industri terhadap fluktuasi harga global. Langkah ini juga menegaskan pentingnya penguatan tata kelola hilirisasi nikel melalui penyusunan *roadmap*, pembangunan ekosistem industri, serta ketegasan dan konsistensi kebijakan.

Komisi XII DPR RI perlu mengambil beberapa langkah strategis untuk mendukung terwujudnya industri nikel nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI dapat memantau pelaksanaan kebijakan dan keselarasan antara sektor hulu dan hilir. Melalui fungsi legislasi, Komisi XII DPR RI dapat mendorong penyusunan peraturan pendukung yang memperkuat tata kelola hilirisasi dengan *roadmap* yang jelas dan terukur. Melalui fungsi anggaran, Komisi XII DPR RI dapat memastikan pemanfaatan anggaran mendukung pembangunan ekosistem industri, serta pengembangan produk hilir bernilai tambah tinggi.

Referensi

- Hidayatullah, M. R. (2025a, November 8). Simalakama jorjoran smelter nikel, strategi hilirisasi perlu diatur ulang. *Bisnis.com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20251108/44/1927195/simalakama-jorjoran-smelter-nikel-strategi-hilirisasi-perlu-diatur-ulang>
- Hidayatullah, M. R. (2025b, November 9). Ekonom sebut moratorium smelter harus diiringi pengendalian izin tambang. *Bisnis.com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20251109/44/1927329/ekonom-sebut-moratorium-smelter-harus-diiringi-pengendalian-izin-tambang>
- Hidayatullah, M. R. (2025c, November 10). Babak baru penghiliran nikel, izin baru smelter dibatasi. *Bisnis.com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20251110/44/1927493/babak-baru-penghiliran-nikel-izin-baru-smelter-dibatasi>
- Hidayatullah, M. R. (2025d, November 10). ESDM harap larangan smelter intermediate dorong investasi produk jadi. *Bisnis.com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20251110/44/1927679/esdm-harap-larangan-smelter-intermediate-dorong-investasi-produk-jadi>

- Mardiansyah, D. (2025, November 10). Kementerian ESDM bakal pangkas target produksi nikel pada 2026, ada apa?. *Kontan.co.id*. <https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-bakal-pangkas-target-produksi-nikel-pada-2026-ada-apa>
- Nurdifa, A. R. (2025, November 11). Stok bijih nikel menumpuk imbas smelter impor dan pangkas produksi. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20251111/44/1927818/stok-bijih-nikel-menumpuk-imbas-smelter-impor-dan-pangkas-produksi>
- Nurdifa, A. R. & Hidayatullah, M. R. (2025, November 12). Pasar nikel terpuruk, stok bijih menumpuk. *Bisnis.com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20251112/44/1928152/pasar-nikel-terpuruk-stok-bijih-menumpuk#goog_rewarded
- Rhamadanty, A. (2025, November 9). PP 28/2025 terbit, investasi baru sektor smelter nikel dibatasi. *Kontan.co.id*. <https://industri.kontan.co.id/news/pp-282025-terbit-investasi-baru-sektor-smelter-nikel-dibatasi>
- Rusdi. (2025, November 11). Tren global bergeser ke LFP, Indonesia harus siap adaptasi strategi nikel. *Nikel.co.id*. <https://nikel.co.id/2025/11/11/tren-global-bergeser-ke-lfp-indonesia-harus-siap-adaptasi-strategi-nikel/>
- Setiawan, V. N. (2025, Juli 31). 4 perusahaan smelter nikel di Sulawesi setop operasi, ini daftarnya. *Cnbcindonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250731082635-4-653771/4-perusahaan-smelter-nikel-di-sulawesi-setop-operasi-ini-daftarnya>
- Soehandoko, J. G. (2025, November 7). Awas oversupply! Komisi XII kritik strategi hilirisasi nikel. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20251107/44/1927001/awas-oversupply-komisi-xii-kritik-strategi-hilirisasi-nikel>